

ETIKA POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF



Oleh:

HARDIONO
NIM: 19205010067

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA
2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1130/Un.02/DU/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARDIONO, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : I9205010067
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611e73568b190



Penguji I

Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
SIGNED

Valid ID: 61230bee17136



Penguji II

Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
SIGNED

Valid ID: 611e7922ad432



Yogyakarta, 12 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 612521fe446a1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hardiono
NIM : 19205010067
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Hardiono

NIM. 19205010067

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ETIKA POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF

Yang ditulis oleh :

Nama : Hardiono, S. Ag
NIM : 19205010067
Fakultas : UshuluddindanPemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : AqidahdanFilsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2021
Pembimbing



Dr. Mutiullah, S.Fil.I, M.Hum

NIP.197912132006041005

Motto

**“Biarapun Kebohongan Itu Lari Secepat Kilat, Suatu Waktu Kebenaran
Akan Mengalahkannya”**

(J.E. Sahetapy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt., dari segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penulisan tesis ini. Kemudian şalawat tak lupa penulis haturkan kepada nabi agung, Nabi Muhammad Saw., yang mana ia telah membawa umat manusia dari alam kejahilan menuju alam yang di mana cahaya kehidupan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tak lepas dari berbagai hambatan, akan tetapi hambatan tersebut bisa ditemukan titik terang dengan adanya proses bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Setelah proses itu terjadi, maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Etika Politik Ahmad Syafii Maarif*". Sebagai ucapan terimakasih, dengan setulus hati penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta segenap jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Imam Iqbal, S. Fil.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta Sekretaris Prodi Bapak Roni Ismail, S.Th.I.,M.S.I

4. Bapak Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing tesis terimakasih bapak atas bimbingan, arahan, waktu, ide-ide, dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Profesor Iskandar Zulkarnain dan Dr. Shofiyullah MZ, S.Ag.,M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan kritik, dan masukan demi perbaikan tesis ini.
6. Kepada seluruh dosen Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih kepada dosen Filsafat Islam terimakasih penulis haturkan atas jasa, ilmu, wawasan, pemikiran, dan nasehat yang telah diberikan.
7. Ayah dan ibu tercinta H. Abdullah (Alm) dan Hj. Dewarni. Terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang, didikan, dan doa. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dorongan semangat berkorban serta selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat serta doa yang selalu di panjatkan untuk kesuksesan penulis, sukses dunia maupun akhirat. Serta saudara-saudaraku Arpandi, Subandi, Junaidi A, Muhammad Fitra, dan Zulyaden. beserta Keluarga yang lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat. Tidak ada yang dapat penulis persembahkan selain doa untuk semuanya. Akan tetapi, dengan tesis inilah sebagai salah satu usaha penulis untuk mewujudkan apa yang telah semuanya harapkan.
8. Kepada guru-guru penulis di pondok pesantren Al-Islam Kemuja Bangka, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah kalian berikan dari

penulis mengenyam pendidikan di tingkat TPA hingga Madrasah Aliyah. Tanpa jasa guru-guru, penulis mungkin akan menjadi buta akan keilmuan yang tak kenal dengan baca tulis. Sekali lagi terimakasih guru-guruku.

9. Kepada teman-teman kelas Filsafat Islam angkatan 2019 (Magister S2), terutama bagi teman akrab *perpesan*, terimakasih selama ini telah memberi berbagai ilmu yang bermanfaat, kenang-kenangan yang indah, serta berbagai macam hal lainnya. Semoga silaturahmi diantara kita ini terus berlanjut hingga nanti.
10. Kepada teman-teman rantauan Bangka di Yogyakarta, yang penulis anggap teman dan keluarga kedua di tanah rantauan. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun semangat dan motivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini, semoga dari hal tersebut kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi bangsa dan negara dan menambah wawasan bagi yang membaca, terutama bagi penulis. Amiin

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Hardiono
NIM. 19205010009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn „Iddah
-----------------	--------------------	-----------------------

C. Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
-----	---------	-------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	A
إ	Kaṣrah	i
أ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī

كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



ABSTRAK

Tesis yang berjudul “**Etika Politik Ahmad Syafii Maarif**” merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat etika dan moral para elite politik dan pelayanan publik, sebab kekuasaan haruslah diberikan kepada orang-orang yang bijak dan jika salah memberikannya maka akan berakibat fatal bahkan mendekati kepada kehancuran suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu Ahmad Syafii Maarif dan juga merupakan bapak bangsa, telah banyak menuangkan pemikiran dan gagasan maupun kritiknya terkait dengan etika politik para penguasa yang sudah terlepas dari nilai-nilai etika Qur’ani dan keislaman. Melihat berbagai kenyataan di negeri ini. Di bidang politik, bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan pada tahap yang sangat krisis. Kursi kepemimpinan disesaki para politikus rabun ayam yang jangkauan pandangannya sangat pendek. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Pada abad ke-20 ini manusia telah kehilangan Tuhan, jika bukan telah mengusir-Nya. Kekuasaan dan moral telah terpisah sama sekali. Manusia sudah kehilangan hati nurani dalam hubungan antar manusia. Untuk itu tesis ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana relasi manusia, etika, dan politik. 2. Bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif. 3. Bagaimana relevansi dari pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keindonesiaan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *historis-filosofis*. Pendekatan yang digunakan seperti ini mengandaikan adanya sisi-sisi kesejarahan yang melingkupi hasil pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang etika politik. Artinya, ada asumsi bahwa hasil pemikiran beliau tentang etika politik tidak mungkin muncul tanpa latar belakang dan keterikatan dengan situasi yang menyelubunginya. Namun kemudian juga melihat dari sisi nilai-nilai kefilosofan yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substantif, etika politik tidak bisa dipisahkan dengan subyek pelaku etika yaitu manusia. Berdasarkan hal tersebut etika politik erat kaitannya dengan bidang pembahasan moral. Maka kewajiban moral dapat dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya yang menyangkut kewajiban manusia terhadap manusia lainnya. Dengan adanya dasar tersebut akan lebih meneguhkan akar dari etika politik bahwa suatu kebaikan itu senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa mengedepankan adab dan budaya. Sehingga pengaktualisasian etika politik harus selalu mengawali kepada ukuran harkat dan martabat manusia. Etika politik Ahmad Syafii Maarif, yaitu terbentuk dari al-Qur’an dan nilai keislaman. Menurut Buya Syafii, al-Qur’an merupakan kitab suci petunjuk moral yang sempurna. Karena al-Qur’an menata seluruh jaringan tingkah laku manusia baik itu secara individu ataupun secara sosial. Al-Qur’an juga memiliki prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, kesejahteraan dan kemanusiaan di dalamnya. Sementara nilai keislaman dalam konteks Indonesia harus di kembangkan sehingga Islam di Indonesia ialah Islam yang ramah, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap bangsa/negara.

Kata kunci: Ahmad Syafii Maarif, Etika, Moral, dan Politik.

ABSTRACT

The thesis entitled "Ahmad Syafii Maarif's Political Ethics" was a research conducted to look at the ethics and morals of the political elites and public services, because authority must be given to wise people and if didn't it will be fatal, even approaching the destruction of a nation and country. Therefore, Ahmad Syafii Maarif and also the father of the nation, has poured his thoughts and ideas as well as criticisms related to the political ethics of the rulers who have been separated from the ethical values of the Qur'an and Islam. In the political field, based on the various realities in this country, this nation is experiencing a leadership crisis at a very critical stage. The seats of power is filled with myopic politicians whose vision is very short. They prioritize personal interests at the expense of the interests of the nation. In this twentieth century man has lost God. Power and morals have been completely separated. Humans have lost their conscience in human relations. For this reason, this thesis will answer several problem formulations, namely: 1. How are human relations, ethics, and politics. 2. How does Ahmad Syafii Maarif thinks about political ethics. 3. What is the relevance of Ahmad Syafii Maarif's political ethics thought in the Indonesian context.

This research is type of library research using a *historical-philosophical* approach. The approach used the historical aspects that surround Ahmad Syafii Maarif's thoughts on political ethics. There was an assumption that the results of his thoughts on political ethics cannot appear without his background and attachment to the situation that surrounds him. Therefore, also look at the philosophical values contained in it.

Therefore, the result of this study indicate that substantively, political ethics cannot be separated from the subject of ethical actors, namely humans. Therefore, political ethics is closely related to moral discussion. Based on this, the notion of morals always shows that humans are ethical subjects. Thus, moral obligations can be distinguished from the understanding of other obligations concerning human obligations to other humans. With this basis, it will further strengthen the roots of political ethics that a good is always based on the nature of humans as creatures who always prioritize attitude and culture. Therefore, the actualization of political ethics must always start with a measure of human dignity and human beings. Ahmad Syafii Maarif's political ethics, which is formed from the Qur'an and Islamic values in Indonesia context. According to Buya Syafii, the Qur'an is a holy book of perfect moral guidance. Because the Qur'an organizes the entire network of human behavior, both individually and socially. The Qur'an also has the principles of justice, democracy, welfare and humanity in it. Meanwhile, Islamic values in the Indonesian context must be developed so that Islam in Indonesia is Islam that is friendly, inclusive, and able to provide solutions to the nation/state.

Keywords: Ahmad Syafii Maarif, Ethics, Morals, and Politics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Telaah Pustaka.....	18
E. Kerangka Teori.....	23
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II: AHMAD SYAFII MAARIF "URANG UDIK" UNTUK MEMBANGUN BANGSA	35
A. Riwayat Hidup Ahmad Syafii Maarif.....	35
B. Pendidikan Ahmad Syafii Maarif.....	40
C. Perjalanan Intelektual Ahmad Syafii Maarif.....	45
D. Fase Perkembangan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif.....	50
E. Karya-karya Ahmad Syafii Maarif.....	53
BAB III : URGENSI ETIKA POLITIK DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA	56
A. Manusia dan Agenda Jalan Lurus.....	56

1. Dialektika Kebaikan dan Keburukan.....	56
2. Manusia dan Politik.....	63
B. Manusia dan Etika Konflik Kepentingan.....	66
C. Etika Politik (Publik) Haryatmoko.....	74
BAB IV : KEMANUSIAAN, KEISLAMAN, KEBANGSAAN; KONSTRUKSI PEMIKIRAN ETIKA POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF.....	88
A. Epistemologi Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif.....	88
1. AL-Qur'an.....	88
2. Islam dan Nasib Bangsa Indonesia.....	95
B. Paradigma Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif.....	98
1. Keadilan.....	99
2. Demokrasi.....	105
3. Kesejahteraan.....	122
4. Kemanusiaan.....	126
C. Civil Society dan Demokrasi; Analisis Terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif.....	134
BAB V : PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membahas mengenai *term* dari etika, ialah etika diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata *ethos*, dalam bentuk tunggalnya *ethos* berarti tempat tinggal, kandang, akhlak, padang rumput, kebiasaan, perasaan, adat, sikap ataupun cara berpikir manusia. Sedangkan *ethos* dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang bermakna suatu adat kebiasaan.¹ Adat kebiasaan inilah yang kemudian menjadi landasan terbentuknya *term* etika yang dipelopori oleh filsuf kenamaan yaitu Aristoteles, yang digunakannya untuk menunjukkan filsafat moral. Kata etika itu sendiri di dalam bahasa Yunani berarti *enthikos* yang mempunyai makna sebagai karakter, kecenderungan, kebiasaan, serta sikap yang dapat melahirkan suatu penganalisisan konsep-konsep seperti benar dan salah, mesti, harus, mengandung pencarian pada sifat moralitas ataupun tindakan moral, dan juga berusaha mencari kehidupan personal maupun ber masyarakat yang baik dan benar.² Dengan moral, manusia dipedomani menjadi pelaku moral yang sadar, yang mempunyai keprihatinan, waspada, menerima prinsip-prinsip perilaku yang baik, mendengarkan akal dan bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Pembahasan utama etika politik ialah hukum dan kekuasaan negara. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia sebagai makhluk individu dan sosial.

¹K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta, 2013), 4

²Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: 1987), 15-16

Etika politik juga harus direalisasikan oleh seluruh individu yang terlibat secara konkret pada pelaksanaan pemerintah negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara, aparat pelaksana, dan penegak hukum dan legitimasi demokrasi, etika politik juga harus berdasarkan pada legitimasi moral.¹

Adapun menurut pandangan Franz Magnis Suseno, etika politik mempersoalkan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lainnya. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa inti dari persoalan etika politik ialah masalah legitimasi etis kekuasaan yang bisa dirumuskan pada pertanyaan: atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang yang memegang dan memakai kekuasaan yang mereka punyai?.² Oleh karena itu, etika politik menuntut supaya kekuasaan dilaksanakan sebagaimana dengan hukum yang berlaku, disahkan secara demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral. Ketiga tuntutan tersebut bisa dikatakan legitimasi normatif atau etis.

Menurut Buya Syafii etika politik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang menjadi subjek pelaku etika. Oleh sebab itu, maka etika politik memiliki kaitan yang sangat erat dengan bidang pembahasan moral. Berdasarkan hal tersebut maka moral dalam pendefinisiannya selalu menunjukkan kepada manusia yang menjadi subjek dari pelaku etika. Oleh karena itu, berdasarkan dari pengertian kewajiban dari etika dapat dibedakan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait

¹Jubair Situmorang, *Etika Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 53

²Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 21

dengan kewajiban manusia terhadap manusia lainnya. Meskipun dalam kaitannya dengan masyarakat, bangsa dan negara yang plural.

Dengan adanya dasar tersebut akan lebih meneguhkan akar dari etika politik bahwa suatu kebaikan itu senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa mengedepankan adab dan budaya. Sehingga pengaktualisasian etika politik harus selalu mengawali kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Akan tetapi dalam hal ini perlu ditekankan, etika politik pada dasarnya tidak dapat memberikan suatu sistem normatif sebagai landasan negara, etika politik dalam posisinya berada tidak sejajar dengan sistem legitimasi politik tertentu serta tidak dapat bersaing dengan ideologi-ideologi negara. Oleh karena itu, maka etika politik hanya mampu membantu berusaha bersama rakyat dalam mewujudkan ideologi negara ke dalam realita politik yang nyata. Contohnya ialah dengan merefleksikan apa poin penting dari *term* keadilan sosial, dasar-dasar etik kerakyatan, serta bagaimana mengetahui serta menjalankan kekuasaan seperti seharusnya yakni dijalani dengan baik.³

Adapun kaitan wacana etika politik, intelektual muslim Indonesia Ahmad Syafii Maarif, selanjutnya nanti akan di sebut dengan Buya Syafii. Beliau tidak pernah lelah menyuarakan tentang betapa pentingnya membentuk negarawan sejati. Menurutnya negarawan sejati ialah pemimpin negara yang elit secara moral. Itu artinya mereka harus bisa menjadi pemeran

³Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), xxiv

utama untuk mencerahkan kepribadian negara.⁴ Menurut Buya Syafii pemimpin negara yang elit secara moral adalah siapa pun yang berusaha keras dalam menghidupkan optimisme bernegara dengan terlebih awal melakukan refleksi dan merubah dirinya.

Kita mengenal bahwa Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi alam semesta merupakan pegangan yang kokoh Buya Syafii dalam menyebarkan gagasan-gagasannya. Diberbagai karya tulisnya, basis pemikiran etika politik Buya Syafii senantiasa dilandaskan pada dua hal yaitu al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman, maka dari itu inilah yang membedakan pemikiran etika politik Buya Syafii dengan tokoh-tokoh yang lainnya mengenai bagaimana menjalankan mesin perpolitikan dengan pedoman yang baik, sehingga laju perpolitikan tetap pada koridornya, serta kedua basis pemikiran tersebut menjadi keunikan tersendiri dari pemikiran Buya Syafii terkait etika politiknya.⁵ Menurut Buya Syafii, al-Qur'an merupakan petunjuk dan sebagai sistem moral mempunyai cakupan pengertian yang sangat luas dan dapat menjadi pedoman dasar bagi arah pembangunan.⁶ Al-Qur'an sebuah prinsip moral tidak bersifat terpendang (elitis). Ia terbuka bagi semua kaum yang berasional untuk menemukan dan mencari kebenaran dan kebaikan, dan al-Qur'an ialah sebuah korpus terbuka yang mungkin akan melahirkan pengertian-pengertian baru yang bisa menyesuaikan zamannya. Dengan

⁴Ahmad Syafii Maarif, "Bangsa Ini Perlu Pencerahan", Prolog, Dalam Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral* (Malang: Intrans Publishing, 2013), 2.

⁵Hilman Latief, *Post Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2017), 149

⁶Ahmad Syafii Maarif, *Al-qur'an, Realitas sosial, dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi* (Bandung: Pustaka, 1984), 40

demikian Buya Syafii sejalan dengan pemikiran gurunya yaitu Fazlur Rahman yang berpandangan bahwa kepentingan sentral al-Qur'an ialah manusia perubahan kehidupannya.⁷ Namun, Buya Syafii sadar bahwa dengan adanya perangkapan Islam dengan kemajuan dunia yang semakin modern bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Diperlukan keseriusan dan strategi dalam pembangunannya, termasuk keharusan adanya keberanian melakukan ijtihad-ijtihad baru.

Bagi Buya Syafii al-Qur'an lebih menekankan prinsip moral yang menjadi *guidance* (panduan) bagi kaum muslim untuk menciptakan kebaikan dan keadilan. Beliau juga masih menaruh besar harapan dari peran agama. Peran agama merupakan suatu pencerahan kepribadian politik, ekonomi, intelektual, dan terutama pencerahan peradaban pada setiap segi kehidupan.⁸ Buya Syafii yakin akan Islam di Indonesia diharapkan bisa memberikan dasar-dasar spiritual, etis, dan moral bagi keutuhan dan kemajuan bangsa dan negara. Bagi Buya Syafii, Islam tidak berlawanan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, akan tetapi dalam perspektif Buya Syafii, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi, bisa dikatakan Islam yang harus ditawarkan adalah sebuah Islam yang bersedia bersama-sama dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.⁹ Beliau juga menyakini bahwa moral Islam harus bisa memberikan pencerahan kepada

⁷Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohamad (Bandung: Pustaka, 1984), 40

⁸*Ibid.*, 3.

⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 144

seluruh kekuatan masyarakat dan demikian, ia yakin bahwa kesejahteraan dan keadilan bisa diperbaiki.

Dalam pandangan Buya Syafii juga menjelaskan bahwa ajaran moral Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada dimensi kehidupan yang terlepas dari sorotan wahyu. Agar ajaran moral tidak hanya berhenti dalam bentuk verbal, maka Islam tidak diragukan lagi memerlukan kekuatan untuk membawanya turun ke bumi. Negara adalah salah satu kekuatan yang diperlukan bagi maksud tersebut. Misalnya dalam soal jihad. Sebab, perintah jihad tidak mungkin dijalankan tanpa adanya institusi kekuasaan yang mendukungnya. Dengan demikian, negara adalah instrumen yang diperlukan bagi pelaksanaan ajaran Islam.¹⁰

Akhirnya, Islam menginginkan terbentuknya masyarakat yang ditegakkan di atas sendi-sendi moral yang utama demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Apakah masyarakat itu sepenuhnya bercorak sipil di mana militer hanyalah sebagai alat pengaman, tergantung kepada ijtihad politik sebuah bangsa. Islam tampaknya tidak memberikan garis tegas dalam persoalan ini. Yang penting adalah agar hak-hak asasi dan kemerdekaan individu wajib dihormati dan dilindungi, tidak boleh ditindas dengan alasan apapun.¹¹

Maka dari itu, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang amat berkepentingan mendaratkan pesan-pesan moralnya dalam konteks kehidupan kolektif manusia. Islam sebagai pesan terakhir dari langit bukan hanya untuk

¹⁰Ahmad Syafii Maarif, *Percaturan Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 261

¹¹*Ibid.*, 262

dijadikan pegangan moral individu-individu yang berserakan di muka bumi. Pesan wahyu baru bermakna bila ditancapkan dalam suatu tata sosiopolitik yang anggun. Di luar itu, ia sekadar cita-cita moral yang utopis. Islam bukan agama utopis! Karier Muhammad yang berhasil mengarahkan jalan sejarah manusia dengan sendirinya adalah bantahan empiris bagi mereka yang mencoba memasung Islam. Di mata al-Qur'an, pasungan seperti itu harus dilenyapkan. Bila tidak, maka Islam hanya mampu berlutut di lorong-lorong kecil kehidupan.¹²

Dalam penamaannya, etika juga dapat dikatakan sebagai filsafat moral yang mana memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu kebaikan serta kejahatan. Begitu juga halnya dengan etika politik yang memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana dan seperti apa tindakan atau perilaku yang benar, baik dan juga tindakan yang salah maupun jahat. Terjadinya ketidakjelasan serta ketidakpastian secara etis terhadap semua tindakan atau perilaku politik di negara ini telah menjadikan kebaikan dan juga budi pekerti publik mengalami kemunduran dan bahkan menuju pada kehancuran. Dengan hal tersebut, politik yang tujuan awal serta fungsi dasarnya sebagai wadah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat sudah tidak berperan sebagaimana komitmen awalnya. Kehancuran yang terjadi tersebutlah yang kemudian mencemarkan nama baik budaya, wajah hukum, pendidikan, maupun agama. Rusaknya tatanan ini telah mengakibatkan masa depan bangsa semakin tidak jelas dengan cita-cita kemerdekaan. Sebuah kekacauan

¹²*Ibid.*, 190-191

yang diperoleh karena etika dan moral bukan dijadikan panduan dalam hidup berpolitik.¹³

Dalam kehidupan bermasyarakat, kata politik sudah tidak asing lagi terdengar oleh masyarakat umum. Adapun salah satu pengertian dari kata politik itu sendiri ialah suatu seni dalam menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan atau seni berpolitik haruslah diserahkan kepada orang-orang tertentu, salah satunya ialah kepada orang yang memiliki sifat bijaksana dan orang yang memiliki etika atau akhlak yang baik dalam artian diserahkan kepada mereka yang berbudi luhur. Tepat atau tidaknya penggunaan kekuasaan, tergantung kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut.

Hal tersebutlah yang kemudian memaksa para pendukung moral-etik untuk memperjuangkan landasan berpikir di atas sebagai tolak ukur dalam membicarakan atau mendiskusikan segala bentuk permasalahan kebangsaan. Selain itu, moral dan etika para politisi juga sangat menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah atau negara, karena pada dasarnya, moral dan etika para politis terhubung kepada persoalan-persoalan yang ada seperti pada persoalan kemiskinan yang hingga kini masih jauh dari kata berhasil. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa moral, etika dan mental para politisi yang korup sangat berdampak pada kondisi kemiskinan masyarakat di suatu wilayah.

Dalam pandangan Buya Syafii, di antara kawasan kegiatan manusia yang sering ditandai oleh iklim panas adalah kawasan politik yang selalu

¹³Nur Rohim Yunus, *Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan*, "Jurnal Ilmu Syariah,FAI UIKA BOGOR, Vol. 2 No. 2 (2014), 263

berkaitan dengan masalah kekuasaan. Sistem kekuasaan yang terlepas dari bingkai moral cenderung merusak dan menghalalkan segala cara, sebab nafsu manusia untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaannya nyaris tanpa ujung. Jikapun perlu, seorang penguasa akan berbuat apa saja, baik itu terpuji maupun tercela, demi kekuasaan. Peribahasa kuno yang berbunyi “Menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan”, pernyataan tersebut tidaklah tabu terdengar oleh kita dalam dunia politik. Kekuasaan yang terlepas dari kendali moral tidak punya kawan dan lawan yang abadi. Segalanya akan sangat tergantung pada terjamin tidaknya kepentingan. Dalam perspektif ini, kita lebih baik tidak berbicara tentang idealisme politik karena dalam sistem kekuasaan serupa itu, idealisme tidak pernah berumur panjang. Konsep lawan dan kawan sangat tidak stabil. Segalanya tergantung pada situasi.¹⁴

Dalam kenyataan, praktik politik jarang yang bersih. Itulah sebabnya, kita sering mendengar ungkapan “politik itu kotor.” Jika itu diucapkan oleh orang yang tidak punya acuan moral, kita tidak perlu terlalu kaget karena memang praktik yang kotor itulah yang menjadi landasan filsafatnya dalam berpolitik. Namun, yang parah ialah jika perbuatan kotor itu dibungkus dalam jubah agama. Yang terlihat sepintas lalu di sini adalah sebuah bungkus yang serbaelok dan manis, tetapi di dalamnya penuh tipuan dan basa-basi. Dalam ungkapan lain, tidak jarang agama dijadikan kedok untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaan.¹⁵

¹⁴Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Dalam Dinamika Zaman* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 111

¹⁵*Ibid.*, 112

Kalau demikian soalnya, mengapa kita sering benar melecehkan etika al-Qur'an dalam berpolitik? Apakah hati kita sudah membatu untuk ditembus kebenaran wahyu? Dua pertanyaan yang perlu sama-sama direnungkan dan dicarikan jawaban terbaik untuk keselamatan umat secara keseluruhan. Apabila tokoh-tokoh Islam tidak lagi peduli dengan persoalan moral, jangan lagi berharap wibawa Islam dalam politik akan dihormati orang. Dan, di atas itu semua, keridaan Allah mungkin akan semakin menjauh dari kita karena kita memang tidak lagi bertolak dari etika al-Qur'an dalam berpolitik. Kita menjadi kelompok sekuler yang terselubung. Bukankah ini lebih berbahaya daripada sekulerisme terang-terangan? Islam lebih menyukai sikap terbuka, bukan sikap pura-pura demi raihan duniawi tetapi dibungkus dalam jubah agama.¹⁶

Buya Syafii pernah mengatakan sebuah argument “Moral bangsa dalam taruhan.” Alasan pernyataan tersebut menurutnya ialah di antara fenomena sosiologis masyarakat Indonesia yang tetap sulit dipahami ialah munculnya dua kecenderungan yang saling berlawanan yaitu. *Pertama*, gejala religiusitas dengan tekan ritual dan kehidupan saleh, moralis, dan bertanggung jawab. Pesan-pesan agama melalui mimbar masjid, gereja, kelenteng, pura, dan lain-lain yang berisikan agar manusia pandai-pandai menjaga diri supaya tidak terjerembab ke dalam malapetaka dan kehancuran moral. Para pengamat mungkin tidak sukar untuk sampai kepada kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat beragama. *Kedua*,

¹⁶*Ibid.*, 117-118

kita menyaksikan kecenderungan segelintir anggota masyarakat, yang anehnya mungkin sebagian berasal dari kelas yang mewakili kategori pertama, yang tidak mau tahu dengan segala bingkai moral. Pelanggaran moral baginya dirasakan enteng saja sekalipun pesan-pesan agama yang sering didengarnya mengancam perilaku yang tidak bertanggung jawab dan yang dapat merapuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Seperti contoh yang sering kita jumpai dan memuakkan kita ialah kecenderungan untuk melakukan skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah Indonesia modern selama hampir delapan dekade sarat dengan muatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, padahal bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius dan sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi. Atribut-atribut mulia dan besar ini teramat sering dihancurkan oleh perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan dan caranya pun bermacam-macam.¹⁸

Dari segi moral, kita dihadapkan kepada pertanyaan yang sangat serius: mengapa para koruptor tidak pernah jera melakukan profesinya ditengah-tengah sebuah bangsa yang digelari religius dengan dasar Pancasila? Apakah undang-undang anti korupsi tidak berdaya dengan serba rekomendasi dan katebelence seorang pejabat?

Terkait pertanyaan-pertanyaan diatas, salah satu kemungkinan jawabannya ialah karena sistem hukum kita masih sangat lemah. Pelaksanaan

¹⁷Ahmad syafii Maarif, *Membumikan Islam Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 229.

¹⁸*Ibid.*

sanksinya sering bersifat pilih-kasih. Seorang koruptor yang dilindungi payung pejabat tetap merasa aman dalam petualangannya menggerogoti sendi-sendi ekonomi negara.¹⁹

Buya Syafii pernah mengatakan secara gamblang, “di antara sekian banyak tokoh bangsa yang saya hormati dan kagumi, Bung Hatta adalah puncaknya.” Alasan Buya Syafii mengatakan hal tersebut ialah komitmen Hatta yang teguh dan konsisten kepada demokrasi. Juga pemikirannya yang sekaligus teoritis dan praktis, “integrasi yang padu antara berbagai teori yang telah dilalap Bung Hatta dan realitas sosiohistoris masyarakat Indonesia.”

Terkait dengan pengaruh Bung Hatta ialah pentingnya moralitas dan visi kenegarawanan dalam politik. Buya Syafii mempertentangkan pendekatan moral dengan pendekatan kekuasaan, dan menyimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan, moralitas sering dikorbankan pada keperluan sesaat untuk kekuasaan. Tugas bangsa untuk mendirikan negara hukum diabaikan terus. Korupsi semakin memburuk sehingga Indonesia kini menjadi salah satu negara yang paling korup di dunia. Pola konflik berdasarkan daerah dan agama yang berkali-kali mengancam keutuhan bangsa diruntut kepada politisi yang meletakkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan nasional.²⁰ Buya Syafii pernah mengatakan jika politik tanpa adanya acuan moral akan sangat sukar sekali mewujudkan keadilan, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

¹⁹*Ibid.*, 231

²⁰*Ibid.*, 16-17

²¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 117-118

Selama hampir empat dekade, kita berkubang dalam budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, apakah belum cukup? Sila kedua dari Pancasila adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi justru perilaku sebagian kita mengkhianati nilai moral dari sila kedua ini. Nilai adil dan beradab sebegitu jauh lebih merupakan hiasan bibir dalam penataran-penataran. Perbuatan korup merupakan perbuatan biadab yang tidak layak dilakukan oleh warga negara dari bangsa yang beradab.

Oleh karena itu, dalam perspektif Buya Syafii, menyebutkan bahwa “Kita berkubang dalam budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan”, tidaklah pantas disimpulkan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia belum lagi tercemar hati nuraninya untuk berbuat merugikan diri sendiri maupun merugikan negara.²²

Di dalam berpolitik Buya Syafii menekankan betapa pentingnya menerapkan etik al-Qur’an daripada etik golongan. Al-Qur’an tampaknya memberikan semacam otonomi kepada manusia untuk beriman atau untuk kufur, tapi dengan tekanan moral yang amat kuat agar manusia itu sebaiknya beriman. Iman sebagai pilihan inilah yang hendak kita kemukakan dalam pemikiran Buya Syafii dalam kaitannya dengan etik al-Qur’an dan etik golongan dalam menuju suatu tingkat persaudaraan Islam yang baik.²³

Adapun di antara tujuan-tujuan Islam dalam berpolitik ialah tercapainya suatu dunia yang manusiawi di atas landasan moral wahyu. Dunia yang manusiawi ini harus dapat diuji dengan pengalaman empiris kita dalam

²²*Ibid.*, 232

²³*Ibid.*, 67

bentuk tegaknya prinsip-prinsip persamaan, keadilan, persaudaraan, dan toleransi.

Prinsip-prinsip mulia tersebut sering benar menghilang dari kehidupan umat, sehingga Islam dilihat orang tampil dalam periode-periode tertentu dalam sejarah dengan wajah bopeng, jauh dari anggun. Di antara sebab utama mengapa situasi memudar ini kita derita ialah karena dasar etik yang kita pedomani dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah sepenuhnya etik al-Qur'an, tapi lebih banyak etik golongan, suku, bangsa, dan kelompok kepentingan. Dan, kita pun berbangga dengan etik yang anti nilai al-Qur'an ini.²⁴

Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk dicari latar belakang mengapa al-Qur'an sudah sejak periode ini membat akar etik suku golongan dan digantikan oleh etik iman yang bernilai universal. Tragisnya ialah bahwa etik golongan ini, pada saat al-Qur'an tidak lagi kita pedomani secara ikhlas, menjadi dominan kembali dalam kehidupan kita dan hati nurani kita sudah tumpul dan al-Qur'an kita dekati dengan sikap basa-basi.²⁵

Adapun dari perspektif filsuf Yunani klasik yaitu Plato di dalam karyanya yang berjudul *Republic* dan juga Aristoteles di dalam karyanya *Politics*. Di dalam dua karya tersebut, Plato dan Aristoteles menjelaskan bahwa pada hakikatnya politik merupakan sesuatu hal yang agung serta mulia, dengan politik tersebut seseorang dapat membangun suatu masyarakat dan bahkan suatu peradaban. Selain itu, suatu peradaban yang maju akan

²⁴*Ibid.*, 68

²⁵*Ibid.*, 69

terbentuk pada tatanan sosial masyarakat yang berasaskan pada etika, norma, hukum dan moral yang dengan begitu akan terbentuknya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, yang berkeadilan, sejahtera dan terwujudnya kemaslahatan bersama. Seorang politisi sejati, dalam mengemban tanggung jawab serta dalam menjalankan kekuasaannya diberbagai lembaga politik akan lebih mengutamakan atau memfokuskan kepada kepentingan bersama daripada kepentingan personal.

Oleh karena itu, tanggung jawab serta pengabdian dari seorang politisi bukanlah hanya terkait kepada materi ataupun kesenangan semata, melainkan terkait pengabdian dalam menunaikan segala amanah-amanah dari rakyat. Namun dalam realitas yang terjadi pada saat sekarang terkhususnya di Indonesia, politisi masih belum dapat menunaikan tanggung jawabnya secara paripurna, bahkan tidak sedikit yang berpolitik hanya demi memperkaya diri sendiri. Para politisi masih belum dapat menunjukkan eksistensi dari politik yang sebenarnya, atau belum dapat menunjukkan bagaimana etika politik yang seharusnya. Serta dalam menjalankan tanggung jawabnya, para politisi masih mementingkan dirinya sendiri dan belum menunaikan amanat dari rakyat secara sempurna.²⁶

Jika kita ingin melihat hilang dan mudarnya etika para politisi dapat dilihat dari sikap ketidakpedulian para politisi tersebut terhadap segala bentuk kritik dan saran dari setiap elemen masyarakat yang mengkritik mereka atas tingkah laku serta kejahatan korupsi mereka. Atas

²⁶*Ibid.*, 257.

ketidakpedulian tersebut dapat diketahui seberapa jauh para politisi dari nilai-nilai etika politik serta tidak menjadikan nilai-nilai etika sebagai pedoman ataupun pegangan mereka dalam berpolitik yang kemudian menjadikan tujuan mereka dalam berpolitik telah bergeser dari tujuan awalnya yaitu dari cita-cita kemerdekaan yang sebenarnya.

Adapun kegunaan dari etika politik ialah untuk menganalisa bagaimana korelasi di antara tindakan kolektif, perbuatan personal maupun struktur-struktur politik yang ada. Terdapatnya pembatasan terhadap korelasi dalam kegunaan dari etika politik ini akan dapat mencegah pemahaman terhadap etika politik yang direduksi menjadi suatu etika yang lebih bersifat personal dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, sudah seharusnya mengetahui bagaimana dan apa tujuan yang hendak dicapai dari etika politik, yang mana tujuannya ialah untuk mencapai suatu perpolitikan yang sehat, baik dan jujur sehingga dengan tujuan tersebut akan dapat membentuk lembaga atau institusi yang berkeadilan dimanapun dan kapanpun.²⁷

Pada masa era reformasi yang membolehkan segala hal ini, kemunduran dalam etika politik yang terjadi pada para politisi disetiap sekap terjangkau membuat prihatin. Kemunduran tersebut ditandai dengan semakin maraknya sikap pragmatisme dalam tingkah laku politik, dimana para politisi tersebut hanya memfokuskan pada urusan dan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Dengan adanya etika politik ini bisa membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang mesti di

²⁷Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*, (Jakarta: 2012), 16

perbolehkan dan begitu juga sebaliknya. Sebagai masyarakat modern maka masyarakat dituntut untuk dapat mengetahui seberapa pentingnya etika dalam melaksanakan perpolitikan di Indonesia.²⁸

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, maka eistemologi etika politik Buya Syafii perlu diulas secara lebih mendalam. Mengingat sampai hari ini, Buya Syafii seakan tidak pernah mengenal kata lelah untuk menyuarakan dan memberikan pandangan-pandangan beliau terhadap perkembangan politik saat ini. Beliau pernah mengatakan politik tanpa adanya sebuah acuan moral dan terlepas dari etika al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman hanya mempunyai satu muara yaitu, sebuah pengkhianatan terhadap seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹

Oleh karena itu hasil penelitian ini nanti sangat di harapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap elite politik, politisi, intelektual, dan maupun masyarakat Indonesia tentunya.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan di dalam penelitian tesis ini maka penulis akan membatasi penulisan ini mengenai ETIKA POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF Maka dari itu penulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif?

²⁸*Ibid.*, 264

²⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 37.

2. Bagaimana relevansi dari pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif.
2. Untuk menganalisis bagaimana relevansi dari etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keindonesiaan.

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang fokus dan minatnya pada kajian isu-isu terkait etika politik. Khususnya juga yang semangatnya mengkaji dari pemikiran Ahmad Syafii Maarif.

D. Telaah Pustaka

Adapun dari pencarian terhadap penelitian terdahulu yang masih ada hubungannya dengan topik yang peneliti angkat, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang bisa menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini:

Pertama, dalam karya tesis dari saudara Adlan Ryan Habibie yang berjudul "*Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif*" karya dari mahasiswa Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Berkenaan dengan hasil penelitian tersebut maka dalam pemikiran etika

politik Ahmad Syafii Maarif yang dimaksud peneliti ialah bahwa etika politik tidak bisa dipisahkan dengan subyek pelaku etikanya yaitu manusia. Oleh sebab itu etika politik merupakan suatu acuan atau pedoman di dalam berpolitik agar selalu berada dalam koredor yang ada. Dalam pemikiran etika politik Buya Syafii, terdapat dua landasan pemikirannya yaitu al-Qur'an dan Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan. Bagi Buya Syafii, al-Qur'an merupakan kitab petunjuk moral yang sempurna. Terutama terkait dengan perilaku manusia baik secara individu maupun sosial. Sementara itu dalam dasar pemikiran yang kedua, Islam dalam konteks keindonesiaan harus ditempatkan pada satu tarikan napas agar Islam yang dikembangkan di Indonesia ialah Islam yang ramah, terbuka, serta bisa memberikan solusi untuk persoalan bangsa dan negara. Sebuah Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, dan keamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dari inti pemikiran etika politik Buya Syafii ialah ada tiga bentuk rumusan atau gagasan, yaitu demokrasi, keadilan, pluralisme dan kesejahteraan dengan memberdayakan potensi ekonomi. Menurut Buya Syafii, gagasan tersebut sampai batas-batas yang jauh sudah dimasukkan ke bawah debu sejarah. Buya Syafii sebenarnya hendak mengajak masyarakat, terutama mengkhhususkan kepada para elite politik, agar tidak meninggalkan nilai-nilai etika berpolitik yang mana etika tersebut berasal dari nilai-nilai al-Qur'an dan Islam.³⁰

³⁰Adlan Ryan Habibie, "*Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif*", Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Kedua, dalam karya tesis dari saudara Rido Putra yang berjudul “*Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif*” karya dari mahasiswa Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Berdasarkan hasil dari penelitian terkait dengan moderasi Islam, bagaimana Buya Syafii memberi tafsiran ulang teks agama (Islam) agar agama di sikapi dan di mengerti oleh pengikutnya, esensi dan substansi agama itu sendiri. Jika sikap saling toleransi antara umat beragama masih terjalin, menurut Buya Syafii masyarakat hendaklah terbuka, toleran, damai, dan demokratis. Empat ciri-ciri tersebut menurut Buya Syafii haruslah menjadi suatu pedoman bagi semua gerakan pembaruan moral dan pembaruan masyarakat Islam di atas bumi ini. Karena agama Islam sangat menginginkan tercapainya suatu tatanan masyarakat yang memiliki wajah ramah dan damai. Oleh karena itu perbedaan di dalam agama, nilai-nilai budaya atau bahkan dalam ideologi, tidak pantas dijadikan sebagai penghambat dalam terwujudnya keinginan atau harapan diatas. Kontribusi dari moderasi Islam Buya Syafii terkait pluralitas agama di Indonesia adalah sudah menyalakan api semangat para pemuda untuk berdialog antar forum lintas agama. Selain itu juga kontribusinya ialah telah kepada umat Islam bahwa mereka harus mampu menjalin pertemanan serta saling bergandengan tangan dengan mereka yang berbeda agama agar terwujudnya kerukunan antar umat beragama.³¹

³¹Rido Putra, “*Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif*”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Ketiga, dalam karya jurnal dari saudara Abdullah yang berjudul “*Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan*” karya dari mahasiswa Jurusan Aqidah dan filsafat, Fakultas ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurnal Politik Profetik Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam penelitian tersebut terdapat tentang keharusan dalam membangun suatu negara yang berlandaskan pada perspektif Islam. Namun, terkait dengan simbol atau tanda-tanda dari suatu negara termasuk dalam kategori tidaklah wajib, karena pada dasarnya yang terpenting ialah menjalankan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Hal ini bertujuan agar esensi dari ajaran Islam dengan perilaku atau perbuatan dari pemeluknya tidak terjadi sesuatu yang bersifat kontradiksi atau tidak saling bertentangan di antara keduanya. Dengan terjadinya kontradiksi-kontradiksi tersebut maka hal tersebut akan memperlihatkan kekurangan dari ajaran Islam yang selama ini dipercayai dan diyakini oleh masyarakat. Konsep demokrasi merupakan konsep yang sangat sejalan dengan agama Islam itu sendiri, karena pada hakikatnya agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan penegakkan hukum yang peripurna, serta menunjukkan bagaimana arti dari kebebasan dalam segenap kehidupan bermasyarakat dan beragama.³²

Keempat, dalam karya tesis dari Hery Huzaery yang berjudul “*Relasi Antara Islam dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif Dalam Perspektif Ulama Al-Salaf Al-Shalih)*” karya dari

³²Abdullah, “*Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan*”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

mahasiswa program studi magister pemikiran Islam program pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012. Di dalam kajian penelitian tersebut dijelaskan bagaimana hubungan antara hubungan Islam dengan negara. Buya Syafii lebih mengedepankan poin-poin yang substantif dan mengesampingkan aspek legal-formal. Pemikiran beliau dipengaruhi dari pemikiran-pemikiran neo-modernism yang lebih mengedepankan penerapan dari ideal moral al-Qur'an daripada ketentuan legal spesifiknya. Karena itu, dalam permasalahan ini buya berpendapat: pertama, beliau tidak setuju dengan argumen yang dilontarkan apabila Islam ialah Agama dan Negara. Menurutnya, peran seorang Nabi ialah tidak lebih dari seorang Rasul yang bertugas menuntun umat Islam ke jalan yang lurus dan benar, seorang Nabi bukanlah seorang pemimpin (kepala pemerintahan) maupun seorang raja. Menurut Buya Syafii pernyataan tersebut tidak terselip pada al-Qur'an ataupun sunnah apalagi pada Piagam Madinah. Al-Qur'an menurut Buya Syafii tidak menjelaskan bagaimana pola teori suatu sistem kenegaraan yang secara langsung sehingga dapat menjadi rujukan bagi umat Islam terkait politik dan kenegaraan. Bagi Buya Syafii, al-Qur'an hanya menjelaskan atau menunjukkan bagaimana etika dalam menjalankan pemerintahan yang benar, yang dapat diaplikasikan dalam perpolitikan serta memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Nilai-nilai etika itu sendiri ialah prinsip-prinsip persamaan derajat, keadilan, dan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan hal tersebutlah, Buya Syafii menolak serta tidak menyetujui argumen yang mengatakan Islam dan negara, mendirikan suatu negara Islam

dan juga formulasi syariat agama Islam. Negara yang memiliki corak Islam menurut Buya Syafii ialah suatu negara yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip dari keadilan di setiap elemen masyarakat. Konsep syura yang terdapat di dalam Islam menurut Buya Syafii merupakan suatu gagasan utama terkait politik di dalam al-Qur'an serta sistem demokrasi dalam suatu negara merupakan sistem yang sangat dekat dengan tujuan serta cita-cita politik dalam al-Qur'an.³³

Berdasarkan penelusuran pustaka dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu penelitian yang tidak bersifat baru dalam artian bahwa penelitian yang mengkaji pemikiran tokoh Ahmad Syafii Maarif telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun meskipun begitu, dalam penelusuran penulis, penulis belum menemukan suatu penelitian yang secara khusus membahas terkait pemikiran etika politik dari Ahmad Syafii Maarif dalam konteks di Indonesia dan bagaimana cara beliau merumuskan etika politik di Indonesia yang bercorak pluralisme.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori etika publik atau bisa juga disebut dengan etika politik dari Haryatmoko. Untuk tercapainya suatu pembaharuan serta untuk mengadakan perbaikan terhadap pelayanan publik, maka etika publik sangat diperlukan serta diterapkan. Sistem yang kurang kondusif dalam pelayanan publik menjadi salah satu penyebab dari munculnya konflik-

³³Hery Huzaery, "Relasi Antara Islam dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif Dalam Perspektif Ulama Al-Salaf, (Al-Shalih)", Tesis,(Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012).

konflik yang ada seperti konflik birokrasi yang berputar (sulit), korupsi, bahkan konflik kepentingan personal, yang kemudian membuat jeleknya sistem pelayanan publik. Pada dasarnya, kualitas moral setiap pejabat bukanlah menjadi tolak ukur yang mutlak, karena di antara berbagai pejabat tersebut juga terdapat paa pejabat yang jujur, adil, bijak, serta berjuang keras demi kepentingan publik (masyarakat). Oleh karena itu, permasalahan pertama kurangnya kualitas pelayanan publik ialah terletak pada sistem pelayanan publik itu sendiri.

Dengan lemahnya pertanggungjawaban serta tranparansi itu yang membuat korupsi memasuki semua bidang kehidupan, dari mulai tingkat yang teratas hingga tingkatnya paling rendah sekalipun dalam pelayanan publik, sektor swasta sampai kepada lembaga swadaya masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan juga lembaga keagamaan. Jadi korupsi bukan hanya mengakar pada *political society*, akan tetapi juga *civil society*. Dengan adanya refleksi kritis terhadap memburuknya pelayanan publik dan integritas publik menjadi keprihatinan utama etika publik. Jika dengan adanya etika publik kepedulian terhadap modalitas, maka tindakan tidak berhenti pada suatu niat saja.³⁴

Konsep “moral” sering digunakan sebagai sinonim untuk “etika”. di balik kedua pengertian tersebut, terdapat nuansa dua tradisi ideologi yang berbeda, yang berorientasi pada falsafat moral yang berbeda. Pada salah satu karya Aristoteles yang berjudul *Ethics a Nicomachean*, selain kata *ethos* yang

³⁴Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 11

berarti “kualitas suatu sifat”, digunakan juga istilah *ethos* yang berartikan kebiasaan. Selain itu, makna dari kata *ethos* ialah suatu proses berpikir serta merasakan, tata cara bertingkah laku dan bertindak yang menghasilkan ciri khas seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. *Term* yang terakhir ini sejalan dengan bahasa latin yang berarti “moral” (*mos, moris*, = adat, kebiasaan). Istilah dari etik selanjutnya menjadi arti teknis, yaitu tidak lagi bermakna sebagai kebiasaan namun memiliki makna “moral” seperti yang berkembang pada saat ini.³⁵

Moral sebagai adat kebiasaan sering dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban khusus, yaitu dihubungkan dengan asas sebagai cara dalam melakukan sesuatu yang bersifat tuntutan entah relatif maupun absolut. Dengan demikian, moral adalah teks normatif serta imperatif yang diucapkan dalam bangunan konsep benar dan salah, baik dan buruk, yang mana ditafsirkan sebagai suatu nilai mutlak atau transenden. Isinya merupakan kewajiban-kewajiban. Dengan begitu konsep “moral” mengacu ke seluruh manusia tertentu sebagai suatu pegangan di dalam melakukan sesuatu, serta dinyatakan pada bangunan konsep baik dan buruk, benar dan salah.

Etika publik ialah refleksi terkait standar ataupun norma yang menentukan sesuatu itu baik dan buruk, benar dan salahnya suatu tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan amanah dalam pelayanan publik. Dalam hal modalitas, keprihatinan pada etika publik telah memberikan pembedaan dengan doktrin-

³⁵*Ibid.*, 12

doktrin saleh ataupun doktrin moral lainnya. Tekanan yang diberikan pada modalitas ini, berusaha memberikan solusi ataupun jawaban atas segala bentuk keluhan dan sinism seperti “hampir dalam setiap aspek kehidupan telah memiliki kode etiknya tersendiri”. Dalam kehidupan, moral telah diajarkan dalam setiap aspek kehidupan, agama pun sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia juga mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, akan tetapi segala bentuk kejahatan seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi masih tetap berkembang pesat di dalam kehidupan politik ataupun bermasyarakat.³⁶

Pemahaman masyarakat terkait istilah mengetahui dengan melakukan masih berada dalam suatu paradoks. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa apabila telah mengetahui maka hal tersebut seakan-akan juga telah melakukan. Sedangkan antara mengetahui dengan melakukan terdapat suatu jarak yang memisahkan mereka, mereka tidak dapat disama ratakan, karena memiliki orientasi yang berbeda-beda. Sama halnya dengan sebuah argument bahwa kita dilarang memberi tahu seseorang, padahal kita sendiri belum melakukannya. Oleh karena itu, arah dari etika publik bukanlah terkait apa yang benar dan salah atau baik dan jahat, namun mengutamakan terkait refleksi tentang cara menjembantani agar prinsip moral dapat menjadi suatu aksi yang nyata.

Adanya etika politik dalam kehidupan maka hal tersebut dapat membantu mengarahkan serta mengatur *political society*, setiap elemen

³⁶*Ibid.*, 13

pejabat atau masyarakat yang terlibat di dalam lembaga atau institusi-institusi negara. Setiap tanggung jawab, penilaian atau bahkan pengambilan suatu keputusan harus didasarkan pada etika publik. Integritas publik memaksa para politisi atau pengemban jabatan di pemerintahan untuk dapat memberikan serta menunjukkan komitmen moralnya dengan mempertimbangkan keseimbangan di antara penilaian dari kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi dan suatu kebijaksanaan dalam menjalankan tugas ketika melayani publik.

Jika obyeknya merupakan pelayanan publik, etika publik harusnya bisa menjadi dasar kegiatan *civil society*, yakni lembaga swadaya masyarakat, swasta, asosiasi nirlaba. Maka subyek etika publik tidak hanya pejabat pemerintah saja atau politisi, akan tetapi semua yang menduduki suatu jabatan yang terkait dengan pelayanan publik. Pemimpin agama, organisasi masyarakat (ORMAS), LSM, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, etika publik tidak berbeda dengan etika politik, sebab keduanya mempunyai kesamaan yang mengandalkan pada tiga dimensi yaitu tujuan, sarana, dan tindakan.³⁷

Jika berbicara berkenaan dengan etika publik, tidak bisa hanya berhenti pada norma dan subyek moral, akan tetapi juga harus memperhitungkan dimensi-dimensinya. Etika publik ialah bagian dari etika politik juga. Yang mana etika politik diartikan sebagai upaya hidup baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk kebersamaan dalam rangka

³⁷*Ibid.*, 15

meluaskan ruang lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil.

Adapun tiga dimensi dari etika politik adalah tujuan, sarana, dan aksi politik. Dari definisi itu peneliti menginterpretasikan ke dalam bentuk tiga dimensi etika publik. *Pertama*, tujuan dinyatakan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang artinya tersedia pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Keprihatian pertama adalah upaya penerapan kebijakan umum yang terbuka dalam mengatur publik. Di dalam negara yang demokratis, pemerintah mempunyai komitmen atas penyelenggaraan negara dan bertanggungjawab atas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kedamaian hidup. Dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik kebijakan umum pemerintah harus terumus dengan jelas dalam hal prioritas, metode, program, dan tujuan dana publik. Lalu menjadi terbuka atas apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dimensi moralitasnya terletak di kemampuan dalam menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.³⁸

Kedua, dimensi modalitas (sarana), yang memungkinkan tercapainya tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik pelayanan publik dengan adanya perhatian khusus pada pembangunan institusi-institusi sosial yang lebih adil. Hal terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi permasalahan dasar. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada tiga prinsip yaitu: 1. peran etika publik di dalam menguji dan mengkritisi

³⁸*Ibid.*, 16

legitimitas terhadap keputusan-keputusan, institusi-institusi dan praktik-praktik politik. 2. Sikap dalam menghadapi struktur, yaitu mengesahkan dan menolak tatanan sosial, ekonomi, dan politik untuk hidup bersama. 3. Prinsip subsidiaritas dalam pelayanan publik, maksudnya kalau masyarakat sendiri, asosiasi, LSM, dan lainnya. Itu dalam penyelesaian masalahnya dengan sendiri tanpa adanya ikut campur dari negara. Prinsip yang terakhir ini agar tumbuhnya inisiatif dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab individu.³⁹

Ketiga, dimensi tindakan politisi dan pejabat publik dituntut agar memiliki integritas publik. Dalam dimensi ketiga ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut masuk akal bila pelaku memiliki orientasi situasi dan mengerti permasalahan. Ini mengandaikan kompetensi teknis, *leadership* dan etika. Bagi para elite politik atau para politisi itu dituntut agar memiliki integritas publik, ini supaya menghindari kekerasan menjadi imperatif moral (ungkapan hormat terhadap martabat manusia), maka penguasaan pengaturan konflik ialah syarat aksi politik yang etis.

Etika publik memiliki tujuan yakni menjamin integritas pejabat dalam melayani publik, maka berurusan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dari semua urusan ini sama dengan obyek etika politik. Hanya saja etika publik mengutamakan

³⁹*Ibid.*, 17

pada cara bagaimana supaya niat baik bisa membawa implikasi praktis, yang berarti niat baik ini harus di topang dengan institusi yang adil.⁴⁰

Berdasarkan telaah diatas serta dengan menggunakan etika publiknya Haryatmoko, maka untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana pandangan etika politik dari Ahmad Syafii Maarif serta implikasi maupun kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran etika politik di Indonesia, di sini pendekatan teori yang akan penulis pakai untuk melihat pemikiran etika politik Ahmad syafii Maarif ialah teori etika publik atau etika politik yang dikemukakan oleh Haryatmoko. Yang mana dalam etika publik ini terdapat tiga dimensi etika publik yaitu tujuan, sarana, dan aksi (tindakan) politik, karena tanpa adanya ketiga dimensi tersebut akan kita terima hanya sebuah kesia-siaan saja. Peneliti melihat keduanya ada suatu kesamaan sudut pandang dan corak pemikiran terhadap etika politik. Dengan menggunakan teori etika publik atau etika politik ini peneliti bisa mendeskripsikan keadaan pemikiran politik dari Ahmad Syafii Maarif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku yang terkait dengan fokus kajian sebagai sumber data (*library research*).⁴¹ Data-data yang dikumpulkan adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, majalah, naskah-naskah,

⁴⁰*Ibid.*, 18

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9

catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan karya tulis baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi yang berkaitan dengan tema penelitian.⁴²

2. Pengumpulan Data

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah tulisan-tulisan atau karya-karya yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif sendiri terutama sekali mengenai etika politik. Sedangkan data sekundernya berasal dari segala tulisan atau karya yang ditulis oleh penulis lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Data-data yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh tentang tema yang dibahas dengan tujuan agar hasil penelitian ini tersistematis dengan baik dan rapi.

3. Pendekatan dan metode penyajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *historis-filosofis*. Pendekatan yang digunakan seperti ini mengandaikan adanya sisi-sisi kesejarahan yang melingkupi hasil pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang etika politik. Artinya, ada asumsi bahwa hasil pemikiran beliau tentang etika politik tidak mungkin muncul tanpa latar belakang dan keterikatan dengan situasi yang

⁴²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandat Maju, 1996), Cet. Ke-7, 33

mencyelubunginya. Namun kemudian juga melihat dari sisi nilai-nilai kefilosofan yang terkandung di dalamnya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, *analisis*, dan *verstehen*. dimaksud dengan deskriptif adalah segala persoalan etika politik dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif akan dideskripsikan sesuai dengan apa adanya dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam pemikiran beliau.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.⁴³

Selanjutnya dengan metode analisis adalah semua bentuk istilah-istilah, ide-ide dalam pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif dianalisa secara kritis. Pada tahap ini diperlukan kreativitas dan kebebasan untuk membedah dan menguraikan berbagai persoalan yang dibahas dan bebas memberikan interpretasi-interpretasi sehingga akan diperoleh sebuah sajian yang lebih dinamis dengan tetap berpijak pada pokok bahasan yang menjadi obyek kajiannya.

⁴³Kaolan, *Metodologi Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58

Metode analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun setelah dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan interpretasi data. Prosedur ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan arti serta pemaknaan secara signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi makna dan uraian. Tahap berikutnya kemudian melakukan suatu penyimpulan berdasarkan fakta-fakta, melalui metode induktif aposteriori. Oleh karena itu metode analisis sebenarnya lebih menekankan pada proses pemberian makna dan mengorganisasikannya berdasarkan sistem dan pola yang telah ditentukan dalam penelitian. Langkah-langkah dalam menerapkan metode analisis yaitu: reduksi data, klasifikasi data, display data, dan melakukan penafsiran dan interpretasi serta mengambil kesimpulan.⁴⁴

Sedangkan *verstehen* lebih mengarahkan pada suatu pemahaman objek penelitian melalui *insight*, *einfehlung* serta *empathy* dalam menangkap dan memahami makna kebudayaan manusia, nilai-nilai, simbol-simbol, pemikiran-pemikiran, serta kelakuan manusia yang memiliki sifat ganda.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁴⁴*Ibid.*, 68

⁴⁵*Ibid.*, 72

Bab kedua, membahas tentang biografi Ahmad Syafii Maarif, latar belakang sosial kehidupannya, pendidikan dan karirnya, dan karya-karyanya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang etika politik sekaligus juga akan menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang apa itu etika politik.

Bab keempat, menjelaskan fokus pembahasan peneliti terkait metika politik Ahmad Syafii Maarif. Pada point ini akan dibahas tentang landasan pemikiran etika politiknya. Bab ini juga akan membahas tentang implikasi dari etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keindonesiaan.

Bab kelima, merupakan penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Saran berisi saran-saran penelitian sejenis yang mempunyai keterkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan dari rumusan masalah mengenai etika politik Ahmad Syafii Maarif, yang mana akan penulis jelaskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam pembentukan etika politik Ahmad Syafii Maarif, yaitu terbentuk dari al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman. Menurut Buya Syafii, al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk moral yang sempurna. Karena al-Qur'an menata seluruh jaringan tingkah laku manusia baik itu secara individu ataupun secara sosial. Tujuan terpenting dari al-Qur'an agar nilai-nilai dan perintah etiknya diagungkan dan bersifat terikat atas perilaku dan kegiatan sosial-politik umat manusia. Sementara dalam pandangan Buya Syafii, nilai keislaman harus di kembangkan sehingga Islam di Indonesia ialah Islam yang ramah, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap bangsa dan negara. Buya Syafii mengatakannya sebagai sebuah Islam yang dinamis dan menyesuaikan terhadap kultur dan agama di Indonesia yang beragam ini. Sebuah agama yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu inti dalam pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif ialah ia berusaha melandaskan politik berdasarkan kepada al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman. Buya Syafii merumuskannya dalam empat gagasan yang

penulis tuangkan dalam penelitian ini yaitu keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

Mengenai relevansi terkait tentang pemikiran etika politik Buya Syafii sebenarnya menawarkan kepada masyarakat, khususnya para kalangan elite politik yang memegang kekuasaan di negara ini dan para pelayan publik, agar selalu mengikuti pedoman etika dan moral dalam berpolitik yang berlandaskan pada al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman serta tidak meninggalkannya supaya laju politik kita selalu pada jalur yang telah ada dan tidak menyimpang dan terlepas dari etika politik yang seharusnya. Ahmad Syafii Maarif dengan segudang karya dan pemikiran dan wawasan yang luas, memungkinkannya bisa membaca dan berbicara terkait kondisi dinamika persoalan sosial-politik khususnya pada bangsa Indonesia saat ini. Dengan adanya pemikiran etika politik Buya Syafii tersebut maka harapan di ranah perpolitikan kita di negara ini akan lebih baik meskipun sistem politik kita masih dengan serba kekurangannya itu.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya di bidang etika politik Ahmad Syafii Maarif tersebut.

Dengan adanya penelitian terkait dengan etika politik Ahmad Syafii Maarif ini bisa dilihat bagaimana seorang guru bangsa yang sangat peduli memberikan perhatiannya terhadap negaranya tercinta ini meskipun banyak kurangnya dan hampir hancur ini. Dan harapan dari pemikirannya lahir sosok

negarawan yang elite secara moral dan nanti akan mencintai bangsa sepenuh hatinya. Kemudian terlepas dari itu, penulis sangat berharap adanya penelitian selanjutnya yang mengkaji terkait dengan etika politik baik itu dari pemikiran Ahmad Syafii Maarif maupun tokoh yang lainnya. Di mana etika politiknya yang penulis temukan terbentuk dari Al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya nanti bisa menemukan dari sisi yang lain terkait pemikiran etika politiknya Ahmad Syafii Maarif dan tidak hanya terpaku kepada dua pembentuk etika politik Buya Syafii di atas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “*Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan*”, Tesis,
(Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar) 2014
- Abdullah, Amin. “*Al-Ghazali di muka cermin Immanuel Kant; Kajian kritis konsepsi Etika dalam Agama*” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 1, Vol. V. 1994
- Al-Ghazali. *Al-Iqtishad fi Al-I’tiqad*, Kairo. 1320 H
- Anwar, Syafii. “Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syari’at” dalam *70 Tahun Ahmad Syafii Maarif: Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, ed. Abdul Rohim Ghazali dan Saleh Partaonan Daulay, Jakarta: Maarif Institute. 2005
- Argenti, Gilli. “*Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah*” Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 NO. 2 November. 2017
- AS, Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo. 1994
- Asad, Muhammad. *The Message Of The Qur’an*, Gibraltar: Dar AL-Andalus. 1980
- Awaliah, Neneng Nur. *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*, Jakarta. 2012
- Azhar, Muhammad. *Etika Politik Islam: Studi Kritis Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: New Transmedia Communication Publisher. 2014

- Bart, Karl. *Ethic*. Dietrich Braun (peny) dan dialihbahasakan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris oleh Geoffrey W. Bromiley, New York:Seabury Press. 1981
- Bertens, K. *Etika*, Yogyakarta. 2013
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 1998
- Edwards, Paul. (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy, Reprinted Edition Vol. 3*, New York: Macmillan Publishing Co.,Inc. And The Press. 1972
- Ghazali, Abd Rohim. dan Saleh Partaonan Daulay. *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif: cermin untuk semua*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity. 2005
- Ghozali, Abd. Rohim Ghozali. “Politik Islam Inklusif: Mempertimbangkan Gagasan Ahmad Syafii Maarif” Dalam Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif, ed. Abd. Rohim Ghozali dan Saleg Partaonan Daulay, Jakarta: Maarif Institute. 2005
- Girardin, Benoit. *Globetics Focus S Benoit Girardin, Ethics In Politics*, Genewa:m Globethics. 2012
- Habibie, Adlan Ryan. “*Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif*”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2019
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset. 1990

- Haris. *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2010
- Haryatmoko, *Etika Politik & Kekuasaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2014
- Haryatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Yogyakarta: Kanisius. 2015
- Heywood, Andrew. *Politics*, 2nd Edition, New York: Palgrave MacMillan. 2002
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: The English Language Book Society and Oxford University Press. 1974
- Hourani, Albert. *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, ter. Suparno, Dahrits Setiawan, Isom Hilmi, Bandung: Mizan. 2004
- <https://mitrazalman.blogspot.com/2014/10/biografi-dan-pemikiran-ahmad-syafii.html> Diakses pada 19 April 2021
- Huzaery, Hery. “*Relasi Antara Islam dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif Dalam Perspektif Ulama Al-Salaf, (Al-Shalih)*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI. 2001
- Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshari Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab Juz VI*, Beirut: Dar al-Masyrik. 1968

- L. Esposito, Jhon. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 2*, Bandung: Mizan. 2002
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma. 2005
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma. 2010
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7, Bandung: Mandat Maju. 1996
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar. 1977
- Latief, Hilman. 2017. *Post Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY. 2017
- Latief, Hilman. *Post Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY. 2017
- Lichtenstadter, Ilse. *Islam and the Modern Age*, New York: Bookman Associates. 1958
- Lubis, M. Sofyan. *Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>. Diakses pada 25-03-2021. 2002
- Maarif, Ahmad Syafii. "Bangsa Ini Perlu Pencerahan", Prolog, Dalam Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, Malang: Intrans Publishing. 2013
- Maarif, Ahmad Syafii. *Al-qur'an, Realitas sosial, dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi*, Bandung: Pustaka. 1984

- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2018
- Maarif, Ahmad Syafii. Cet. III. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan. 1995
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES. 1985
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2017
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, Bandung: Mizan. 2017
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2018
- Maarif, Ahmad Syafii. *Membumikan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Maarif, Ahmad Syafii. *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentitas dalam Kegalauan*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2004

- Maarif, Ahmad Syafii. *Titik Kisar di Perjalananku. Autobiografi Ahmad Syafii*
Maarif, Bandung : PT Mizan Pustaka. 2009
- Maarif, Ahmad Syafii. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku*, Bandung: PT Mizan
Pustaka. 2009
- Maarif, Ahmad Syafii. *Tuhan Menyapa Kita*, IRCiSoD: Yogyakarta. 2020
- Maarif, Ahmad Syafii. *Percaturan Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, IRCiSoD: Yogyakarta. 2021
- MacIntyre, Alasadir. *After Vitue: Study in Moral Theory*, Indiana: University of
Notra Dame Press. 1984
- Madjid, Nurcholish. *Cita-cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina. 2009
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis
Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta:
Paramadina. 2000
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 2012
- Misrawi, Zuhairi. “Dialektika Islamisme, Khilafah dan Syariat” dalam
Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila, ed. Komaruddin
Hidayat, Bandung: Mizan. 2014
- Mubarak, Ahmad dan B. Wiwoho. *Etika dan Moral Kepemimpinan*, Jakarta: PT.
Bina Rena Pariwisata. 2003

- Musa, Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka LSI. 1991
- Najib, M dan Kwat Sukardiyono (Ed). *Amien Rais Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani. 1998
- Nasution, Harun. Cet. Ke V. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986
- Putra, Rido. “*Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif*”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2019
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Terj. Ahsin Mohamad, Bandung: Pustaka. 1984
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Chicago: Chicago University Press. 1979
- Rawls, John. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019
- Raziq, Ali Abdul. *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*, Beirut: Maktabah al-Hayat. 1966
- Ridha, Rasyid. *Al-Khilafah au Al-Imamah Al-'Uzhma*, Kairo: Al-Manar. 1341 H
- Runes, Dagobert D. (ed). *Dictionary of Philosophy*, New Jersey, Totowa: Littlefield, Adams &Co. 1971
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia. 2010

- Sahal, Akhamd. "Khilafah: Antara Api Islam dan Abunya". Dalam *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*, ed. Komaruddin Hidayat, Bandung: Mizan. 2014
- Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial; Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997
- Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta: Kinta. 1974
- Saydam, Gouzali. *55 Tokoh Asal Minangkabau Di Pentas Nasional*, Bandung: Alfabeta. 2009
- Situmorang, Jubair. Cet. Ke-1. *Etika Politik*, Bandung: Pustaka Setia. 2016
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1993
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia. 1999
- Suseno, Frans Magnis. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, Jakarta: Kanisius. 1998
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta. 1987
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern I*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius. 1987

Syafii, Inu Kencana. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997

Syefriyeni. *Etika: Dasar-dasar Filsafat Moral*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press. 2006

Taimiyah, Ibnu. *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba, Tugas Negara Menurut Islam*, Terj. Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Ul Haq, Fajar Riza. *Sang Anak Panah: Sebuah Pengantar*, Jurnal MAARIF, Vol. 4, No. 1. 2009

Viva.co.id/siapa/read/297-ahmad syafii-maarif di akses pada hari Sabtu 04 2021 jam 14:19.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: ELSAQ Press. 2007

Ya'kub, Hamzah. *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro. 1988

Yunus, M. Yunan. *Teologi Muhammadiyah Citra Tajdid dan Realitas Sosial* Jakarta: Uhamka Press. 2005

Yunus, Nur Rohim. Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan, "*Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR*, Vol. 2 No. 2
https://www.academia.edu/30583333/ETHICS_AND_MORALITY_BOARD_MEMBER. 2014

Zayd, Nasr Hamid Abu. *Imam Syafii, Moderasi Ekletisme, Arabisme*,
Yogyakarta: LkiS. 1997

Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press. 1990

